

((dari Hal 1

Komis Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengeluarkan biaya cukup besar untuk menyelenggarakan pilkada. Alhasil, jika masyarakat golput, selain kecil kemungkinan adanya perubahan kesejahteraan yang akan dirasakan, di sisi lain juga terjadi pemborosan keuangan negara yang bersumber dari pajak rakyat.

"Jika ingin ada perubahan, ya harus datang ke TPS dan memberikan suara. Jika ada masyarakat yang beranggapan golput lebih baik, saya rasa tidak. Jika sudah memberikan suaranya, setidaknya ada usaha dan membuka kemungkinan terjadi perubahan," tutur Tunjung.

Dosen Ilmu Pemerintahan itu juga mengapresiasi seruan dari Gubernur dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY agar masyarakat memakai hak pilihnya dalam Pilwali Kota Yogyakarta dan Pilkada Kulonprogo. Seruan moral itu dinilai sebagai upaya pemerintah dan ulama mengajak masyarakat terlibat langsung dalam mewujudkan perubahan kesejahteraan.

"Melihat data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa waktu lalu, angka ketimpangan ekonomi di DIY cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Artinya, jika ingin memperbaiki kesejahteraan, gunakanlah hak pilih di TPS," tandasnya.

Di sisi lain, paslon ataupun kepala daerah terpilih juga harus memberikan timbal balik kepada masyarakat dengan memberikan bukti kerja sesuai

visi, misi, dan program kerja yang ditawarkan selama masa kampanye. Jangan sampai masyarakat ditekan untuk berpartisipasi dalam pilkada, tapi sebaliknya kepala daerah terpilih tak membuktikan komitmennya.

"Tanda seorang paslon berkomitmen mau bekerja baik, selain dari visi dan misi, salah satunya bisa dilihat sejak proses awal pilkada apakah paslon berdemokrasi dengan jujur dan berintegritas. Atau, melakukan tindak kecurangan untuk meraup suara," katanya.

Oleh sebab itu, masyarakat juga diminta *tracking* prestasi paslon agar tidak salah pilih sehingga perubahan kesejahteraan bisa tercapai seperti apa yang diharapkan masyarakat. "Tinggalkan sikap apatis, gunakan hak pilih, jangan salah pilih, nantinya masyarakat sendiri yang menikmati hasilnya," tutur Tunjung.

Sementara praktik politik uang diprediksi masih menyelimuti penyelenggaraan Pilkada 2017. Menurut pengamat politik dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta Lukas Ispantriarno, potensi praktik politik uang akan terus menghantui proses demokrasi. Sebab, belum ada aturan yang mengatur sanksi berat bagi paslon.

"UU Pilkada belum memberi sanksi tegas bagi paslon yang berbuat curang melakukan politik uang, seperti pembatalan sebagai peserta pilkada," ujarnya, mengkritik.

Dia menilai biaya politik untuk maju sebagai paslon dan tak menentukannya kondisi ekonomi menjadi faktor peluang

tumbuh subur yang praktik politik uang. Apalagi, secara kasatmata, dari penyelenggaraan pilkada sebelumnya marak dijumpai suatu wilayah yang terpasang spanduk bertuliskan warga siap menerima serangan fajar, politik uang, dan sejenisnya.

"Muncul kesan pragmatis dari dua pihak. Selain itu kederisasi di tubuh parpol belum berjalan optimal. Di sisi lain juga faktor lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap politik dan demokrasi," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu.

Lukas berharap komitmen paslon untuk memberi contoh pendidikan politik yang baik. Masyarakat juga diharapkan menolak politik uang karena mencoreng proses demokrasi. "Kami bisa berharap kepada generasi muda, harus melek pendidikan dan melek media agar bisa berpikir rasional. Lembaga pendidikan juga bisa menjadi basis pencerahan politik. Jangan menggadaikan suara supaya tak merugi, setidaknya selama lima tahun ke depan. Pilihlah sesuai hati nurani, sebelum memilih jangan lupa lihat rekam jejak paslon," ajaknya.

#### Kampanye Tak Gereget

Beban berat dipikul KPU Kulonprogo untuk sukseskan pilkada yang dilaksanakan serentak hari ini. KPU harus mampu meningkatkan partisipasi pemilih minimal memenuhi target nasional 77,5%. Padahal, pilkada monoton dan kurang gereget.

Pengamat Politik Kulonprogo, Sapardiyono mempre-

diksi, Pilkada Kulonprogo akan berjalan lancar dalam suasana kondusif. Hanya, partisipasi pemilih cenderung menurun dari partisipasi pilkada 2011 sekitar 69,11%. "Penurunan ini akan sedikit dan tidak signifikan," kata Sapardiyono, yang juga mantan anggota KPU Kulonprogo dan DIY.

Selama masa kampanye, geliat pilkada tidak begitu terasa. Tidak seperti di Kota Yogyakarta yang lebih menggeliat. "Bisa mempertahankan 69% sudah cukup bagus," ujarnya.

Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, KPU Kulonprogo Tri Mulatish sendiri tetap bertekad target partisipasi bakal tercapai. Untuk itu, mereka telah melakukan berbagai upaya agar warga yang berhak ke bilik suara mau datang ke TPS. Mulai dari memaksimalkan petugas daftar pemilih (Pantarlih) hingga mengecek melalui sistem data pemilih (Sidalih). Bahkan, warga juga diminta untuk mencermati data pemilih sementara sebelum ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.

Menurutnya, partisipasi pemilih sangat ditentukan dengan validitas data. Biasanya mereka yang tidak datang karena memang tidak ada di lokasi. Sementara KPU sudah memaksimalkan *update* data pemilih. "Data pemilih kami lebih valid," katanya.

Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulonprogo, Burhani Arwin mengatakan, DM mengajak semua warga Muhammadiyah, baik yang merupakan partisan

partai politik ataupun tidak, untuk berpartisipasi aktif menyaksikan pilkada dengan gerakan moral anti politik uang.

Karena, politik uang melanggar norma agama sekaligus mencederai nilai demokrasi. Untuk itulah Muhammadiyah mengajak warga melakukan pengawasan swakarsa. Siapapun paslon dan orangnya, harus ditindak.

Sementara itu, KPU Kulonprogo menyatakan semua logistik dan kebutuhan pilkada mulai kemarin siang didistribusikan ke TPS. Bagi warga di luar DPT, bisa ikut memberikan hak suara dengan menggunakan surat keterangan (suket) ataupun e-KTP.

"Dari sisi penyelenggaraan semuanya sudah siap dan hari ini (logistik) kami distribusikan," ucap M Isnaini, Ketua KPU Kulonprogo, pada pelepasan distribusi surat suara, di Gudang KPU Wates, kemarin.

Sementara Kapolres Kulonprogo AKBP Nanang Djunaedi mengatakan, ada enam TPS yang dipetakan sebagai TPS rawan. Dua TPS berada di Desa Glagah dan dua di Desa Palihan, Temon yang merupakan warga terdampak bandara. Mereka juga menolak surat undangan (C6) yang merupakan surat undangan untuk pencoblosan.

Dua TPS lainnya berada di Bugel, Panjatan yang dulu juga ada gejala terkait penambangan pasir besi. "Ada 18 warga yang menolak C6, tapi masih kami pantau apakah tetap menolak atau tidak," kata Nanang.

●ristuhanafi/  
kuntadi